

PENINGKATAN KOMPETENSI PTK PNF MELALUI KAJI TINDAK TERINTEGRASI BERBASIS KOMPETENSI (*Integrated Competency-based Action Research*)

Dewa Komang Tantra*

Abstract

The article points out global phenomena that should be considered in developing professionalism of NFE educators. The phenomena are (1) globalization, (2) universalization of education, (3) competency-based education, (4) constructivism, (5) ICT-based education, (6) regional autonomy, (7) National Education Systems Act, (8) Government Regulation on National Standard Education, (9) national competitiveness, (10) education autonomy, (11) Organizational health. Other aspects influencing NFE programs are philosophy and trends in education regarding (1) competency, and life skill-based education, (2) participant-oriented instruction, (3) the use of media for learning especially electronic media, and (4) basic technology education. NFE deals with problems in regards of educators, that is the small number and unqualified personnel. Topic suggests that a model called Integrated competency-based action research would help improve the quality of educators' performance. The model is systemic, interdependent, and functional. It recommends that partnerships with all respective parties are prime of important.

Keywords : global phenomena, trends in education, integrated competency-based action research.

PENDAHULUAN

Pengembangan profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan nonformal (PTK PNF) untuk masa depan tidak dapat dilepaskan dari sejarah perkembangannya di masa lalu maupun keadaan yang berlaku di masa sekarang. Selain sejarah perkembangan di masa lalu maupun *state of the art* yang berlaku sekarang, acuan lain yang tak kalah penting untuk dicermati dalam pengembangan profesionalisme PTK PNF adalah berbagai permasalahan dan tantangan yang harus dihadapi.

Hingga saat ini, mutu PTK PNF ditengarai masih kurang memuaskan, baik dalam hal penguasaan substansi keilmuan maupun kompetensi dalam menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik. Penguasaan bidang studi dinilai kurang mantap/kurang mendalam. Di samping itu, kompetensinya dalam menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik dirasakan kurang memadai. Isu tentang kualitas PTK PNF yang masih rendah ini tidak dapat dilepaskan dari tantangan globalisasi yang nyaris tak terelakkan dan

perubahan situasi secara nasional. Kedua faktor tersebut memiliki implikasi terhadap perlunya peningkatan standar kualitas PTK PNF hingga mencapai atau mendekati standar nasional atau bahkan standar internasional.

Perubahan tatanan dunia global dalam kemasan WTO, AFTA dan NAFTA memaksa Indonesia untuk aktif sebagai pemain utama. Sebagai bagian dari tata dunia baru di era persaingan pasar global, Indonesia dituntut untuk mampu melahirkan manusia-manusia yang berkualitas yang akan memainkan peran sebagai garda depan persaingan antar bangsa-bangsa. Tanpa mampu bersaing dengan bangsa-bangsa lain Indonesia hanya akan menjadi pelengkap penderita dan obyek permainan bisnis negara-negara maju. Atas dasar realitas dan tantangan masa depan seperti di atas, maka menyiapkan individu-individu yang berkualitas dengan sejumlah karakteristik jiwa patriotik menjadi kebutuhan yang tidak bisa ditawar lagi.

PEMBAHASAN

Analisis Konteks dan Kebijakan

Ada beberapa fenomena global yang perlu mendapat perhatian dan dijadikan acuan dalam upaya pengembangan profesionalisme PTK PNF yaitu: (1) globalisasi, (2) universalisasi pendidikan, (3) pendidikan

berbasis kompetensi, (4) filsafat konstruktivisme, dan (5) pendidikan berbasis teknologi informasi.

Globalisasi

Abad ke 21 ditandai dengan fenomena globalisasi, yaitu terjadinya proses perubahan hubungan, antar bangsa dan antar negara tanpa terikat oleh batas geo-sosial politik atau geo-nasional

*Dosen Universitas Pendidikan Ganesha, Singaraja

ideologis. Seluruh dunia cenderung menjadi satu dan membentuk saling ketergantungan erat tanpa mengenal batas-batas yang jelas, apapun sifat batas-batas tersebut. Globalisasi tidak hanya terjadi dalam bidang ilmu, teknologi dan seni (IPTEKS) tetapi juga dalam bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya, termasuk bidang pendidikan pada umumnya dan pendidikan tenaga kependidikan pada khususnya. Hal ini memiliki implikasi terhadap peranan PTK PNF sebagai wahana untuk melahirkan lulusan yang memiliki kemampuan dan daya saing tinggi.

Universalisasi Pendidikan

Sebagai kelanjutan dari konsep pendidikan semesta (*universal education*) deklarasi tentang pendidikan untuk semua (*education for all*) yang dicetuskan pada awal 1990-an banyak mempengaruhi pandangan negara-negara di dunia tentang pendidikan, termasuk Indonesia. Konsep pendidikan untuk semua meliputi pendidikan dasar (*basic education*) bagi semua warga negara diikuti dengan pendidikan berkelanjutan (*continuing education*) bagi berbagai pihak yang memerlukannya. Isi deklarasi ini telah mendorong ditingkatkannya upaya pemerataan pendidikan untuk berbagai kelompok masyarakat, termasuk kelompok masyarakat yang kurang beruntung (*disadvantaged groups*).

Pendidikan Berbasis Kompetensi

Dalam rangka membangun landasan yang lebih baik bagi pendidikan masa depan, *Commission on Education for the Twenty-first Century* dalam laporannya kepada UNESCO mengemukakan pentingnya saling pengertian antar manusia dan bangsa yang penuh kedamaian dan harmonis sebagai hal yang dirasakan amat kurang dalam kehidupan dunia dewasa ini. Dengan menerima kenyataan itu, komisi menetapkan pentingnya membangun kebersamaan masa depan di mana belajar sepanjang hayat merupakan denyut jantung masyarakat dan kunci memasuki abad ke-21, serta sekaligus mengemukakan empat pilar pendidikan yang diajukan dan digambarkan sebagai landasan pendidikan (*the foundations of education*), yaitu: *learning to know, learning to do, learning to be, and, learning to live together*.

Filsafat Konstruktivisme

Masih berkenaan dengan perkembangan gagasan dasar di bidang pendidikan, dalam periode dua dasawarsa terakhir ini, filsafat konstruktivisme sangat mempengaruhi perkembangan instrumentasi dan praksis pendidikan di seluruh dunia. Pendekatan yang berwawasan proses psikologis individu dan interaksi sosial-kultural yang digunakan menempatkan penguasaan pengetahuan individu sebagai hasil konstruksi atau rekonstruksi manusia melalui interaksi yang dinamik dengan obyek, fenomena dan lingkungannya. Pengetahuan tidak lagi dipandang sebagai kumpulan fakta semata, tetapi sebagai keseluruhan wawasan yang dihasilkan dari proses psikologis dan sosial-kultural yang terus berkembang dan berubah. Gagasan-gagasan yang terkandung dalam filsafat konstruktivisme ini melahirkan perubahan mendasar dalam paradigma pendidikan dan pembelajaran.

Pendidikan Berbasis Teknologi Informasi

Selain perkembangan dalam konsep dasar kependidikan, kemajuan di bidang teknologi informasi banyak membawa dampak bagi perkembangan dunia pendidikan dewasa ini, terutama berkenaan dengan sistem penyampaian pendidikan. Teknologi komputer dan internet, baik perangkat keras (*hardware*) maupun perangkat lunak (*software*), memberikan banyak tawaran dan pilihan bagi dunia pendidikan. Sejalan dengan perkembangan teknologi internet, banyak kegiatan pembelajaran yang dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi ini seperti *Cyber* atau *Electronic Learning (E-Learning)* yang bisa juga disebut sebagai pembelajaran berbasis web

Tuntutan ini mengisyaratkan agar mempertimbangkan dengan serius penggunaan ilmu pengetahuan secara kritis. PTK PNF diharapkan memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang profesi kePTK PNF yang baik, sehingga mereka menjadi sosok PTK PNF yang memiliki karakter dan keprofesionalan. Tantangan globalisasi juga menuntut agar PTK PNF memiliki kualitas dan mampu beradaptasi dengan lingkungan nasional dan internasional.

(*Web-Based Instruction*). Kemudahan yang ditawarkan oleh teknologi ini mencakup kecepatan dan ketidakterbatasan tempat dan waktu untuk mengakses informasi. Instrumentasi dan praksis pendidikan tersebut disatu pihak telah mendorong lahirnya berbagai paradigma pengelolaan pendidikan PTK PNF, dan pengembangan berbagai studi yang berkaitan dengan bagaimana pendidikan PTK PNF dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan konteks nasional dan global. Di samping pengaruh global yang telah dipaparkan

dalam bagian terdahulu, terdapat pula beberapa perkembangan baru pada tingkat nasional berkenaan dengan sistem pemerintahan.

Otonomi Daerah

Terbitnya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom, menunjukkan adanya perubahan mendasar dalam sistem pemerintahan di Indonesia dari sentralisasi ke arah desentralisasi dengan titik berat otonomi daerah pada tingkat kabupaten/kota. Perubahan sistem pemerintahan tersebut menimbulkan perubahan pula pada sistem pengembangan sumber daya manusia melalui jalur pendidikan. Dengan kata lain, sistem penyelenggaraan pendidikan nasional yang selama ini bersifat sentralistik dengan sendirinya berubah pula menjadi sistem yang lebih bersifat desentralistik. Hal ini berarti pula telah mulai dilaksanakannya demokratisasi pendidikan secara sistematis dan sistemik.

Undang-Undang tentang Sisdiknas

Mengiringi perubahan paradigma politik nasional pendidikan tersebut di atas telah diterbitkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang melahirkan paradigma baru pendidikan nasional. Undang-undang tersebut secara tersurat menggariskan prinsip-prinsip pendidikan: (a) demokratis dan berkeadilan; (b) sistemik dan multimakna; (c) kebudayaan dan pemberdayaan; (d) keteladanan, kemauan dan kreatifitas; (e) pengembangan budaya membaca menulis dan berhitung; dan (f) pemberdayaan semua komponen masyarakat. Khusus mengenai tenaga kependidikan digariskan bahwa pendidik adalah tenaga profesional yang harus memiliki kualifikasi minimum dan sertifikasi sesuai dengan jenjang kewenangan mengajar, sehat jasmani dan rohani serta mempunyai kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

PP RI tentang SNP

Sesuai dengan amanah dari Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, maka ditetapkanlah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, yang secara umum menetapkan kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Khusus tentang pendidik

dipersyaratkan memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Dengan memperhatikan sejarah perkembangan, keadaan sekarang, dan berbagai isu serta tantangan yang harus dihadapi oleh PTK PNF maka untuk masa depan PTK PNF hendaknya dibangun dalam tatanan paradigma baru pendidikan. Tiga kebijakan dasar yang mencerminkan paradigma baru dalam pengembangan profesionalisme PTK PNF di masa depan perlu mendapat perhatian semua pihak. Profesionalisme PTK PNF perlu ditingkatkan dalam kerangka: 1) meningkatkan daya saing bangsa, (2) otonomi, dan (3) kesehatan organisasi.

Daya Saing Bangsa

Agar dapat bersaing secara global, maka penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi mutakhir menjadi semakin penting sebagai mesin pertumbuhan dan perkembangan (*engine of growth*). Tuntutan ini mengisyaratkan agar mempertimbangkan dengan serius penggunaan ilmu pengetahuan secara kritis. PTK PNF diharapkan memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang profesi kePTK PNF yang baik, sehingga mereka menjadi sosok PTK PNF yang memiliki karakter dan keprofesionalan. Tantangan globalisasi juga menuntut agar PTK PNF memiliki kualitas dan mampu beradaptasi dengan lingkungan nasional dan internasional.

Otonomi

Otonomi pendidikan mengindikasikan pluralisme dalam perencanaan dan pengelolaan pendidikan sesuai dengan kapasitas daya dukung (*carrying capacity*) masing-masing lembaga pendidikan. Otonomi dalam pengelolaan akan menjamin pemberdayaan (*empowerment*), penyediaan peluang (*enablement*), dan fasilitasi (*facilitation*). Dengan otonomi, maka peran PTK PNF akan bertambah besar, karena tanggung jawab (*responsibility*) dan akuntabilitas (*accountability*) menjadi bagian dari perannya.

Kesehatan Organisasi

Kesehatan organisasi mengacu pada kondisi paripurna yang memungkinkan sebuah organisasi berfungsi mengejawantahkan visi dan misinya. Ciri utama sebuah organisasi yang sehat adalah kemampuan untuk menyemaikan kebebasan akademik, menghargai inovasi dan kreativitas akademik yang memungkinkan pemberdayaan individu untuk berbagi pengetahuan demi mencapai suatu keberhasilan. Suatu lembaga yang sehat juga

mendorong tindakan yang bersifat proaktif, efisien, efektif dan bertanggung jawab. PTK PNF sebagai tenaga profesional yang sehat diharapkan mampu mendidik warga belajarnya untuk mengadaptasi situasi yang kompleks dan sulit. Sistem pengelolaan pendidikan yang sehat merupakan suatu upaya penjaminan mutu.

Di samping ketiga acuan dasar di atas, beberapa pemikiran dan kecenderungan baru dalam pendidikan yang perlu pula dicermati adalah adanya pergeseran yang terjadi dalam dunia pendidikan pada umumnya maupun dunia pendidikan PTK PNF pada khususnya. Kecenderungan baru dalam dunia pendidikan pada umumnya meliputi pergeseran ke arah (a) pendidikan berbasis kompetensi dan *life skills*; (b) pengajaran yang berpusat pada warga belajar; (c) pembelajaran yang berbasis media terutama media elektronik; dan (c) pendidikan teknologi dasar.

Perubahan tatanan dunia global dalam kemas WTO, AFTA dan NAFTA memaksa Indonesia untuk aktif sebagai pemain utama. Sebagai bagian dari tata dunia baru di era persaingan pasar global, Indonesia dituntut untuk mampu melahirkan manusia-manusia yang berkualitas yang akan memainkan peran sebagai garda depan persaingan antar bangsa-bangsa. Tanpa mampu bersaing dengan bangsa-bangsa lain Indonesia hanya akan menjadi pelengkap penderita dan obyek permainan bisnis negara-negara maju. Atas dasar realitas dan tantangan masa depan seperti di atas, maka menyiapkan individu-individu yang berkualitas dengan sejumlah karakteristik jiwa patriotik menjadi kebutuhan yang tidak bisa ditawar lagi.

Menyiapkan sumber daya manusia yang memiliki keunggulan kompetitif dan berkarakter nasionalisme tinggi, merupakan tugas utama sektor pendidikan. Namun, data dan fakta yang ada menunjukkan bahwa mutu pendidikan kita masih rendah sehingga tidak mampu menghasilkan lulusan yang berkualitas dan memiliki karakter kepribadian yang patriotik.

Rendahnya mutu pendidikan pada umumnya, dan pendidikan nonformal pada khususnya di Indonesia bukanlah hal yang tidak lazim, sebab sejak bertahun-tahun pembangunan sektor pendidikan memang tidak secara khusus memprioritaskan peningkatan mutu, melainkan lebih terfokus pada pemerataan kesempatan pendidikan. Fakta tentang rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia juga dapat dirunut dari kualitas profesionalisme para PTK PNF. Pada umumnya, kualitas PTK PNF di Indonesia masih belum memadai. Oleh karenanya, kebijakan memposisikan PTK PNF sebagai profesi perlu didukung sebagai salah satu

tahapan dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan secara keseluruhan.

Untuk kepentingan tersebut secara formal pemerintah sudah menetapkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Peraturan perundang-undangan tersebut pada dasarnya dimaksudkan untuk mempercepat laju peningkatan mutu pendidikan dan menjamin kepastian hukum pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan di lapangan.

Kondisi Saat Ini

Ada sejumlah kondisi riil di lapangan yang perlu diperhatikan dalam menemu-kenali strategi implementasi kebijakan profesionalisasi PTK PNF yang tepat. Kondisi-kondisi riil yang ada di lapangan sangatlah kompleks bentuk maupun sifatnya, sehingga dapat menimbulkan berbagai masalah-masalah yang cukup pelik pemecahannya. Namun, masalah-masalah riil yang akan dibahas di sini dibatasi pada masalah yang terkait dengan kualitas PTK PNF, antara lain sebagai berikut.

Masalah Kekurangan PTK PNF.

Di lapangan masih banyak terjadi ketimpangan. Hal ini terjadi karena jumlah PTK PNF tidak sebanding dengan jumlah warga belajar yang harus dilayani. Kondisi seperti itu sangat mempersulit seorang PTK PNF, yang secakap apapun, untuk dapat tampil secara profesional dan berkinerja secara optimal. Rasio PTK PNF warga belajar yang tidak ideal dapat berakibat pada rendahnya kualitas kinerja PTK PNF pada khususnya, dan kualitas pendidikan pada umumnya. Pada tahun 2005, data PTK PNF menunjukkan kekurangan secara kuantitatif yang cukup serius. Data tersebut seperti tertuang dalam tabel berikut ini.

Tabel Jumlah PTK PNF tahun 2005

No	Jenis Tenaga	Dibutuhkan	Tersedia	Kekurangan
1	Pamong Belajar	4.775	3.432	1343
2	Penilik	13.800	6.651	7149
3	Tutor KF	154.259	14.259	0
4	Tutor Paket A Setara SD	7.177	7.146	33
5	Tutor Paket B Setara SMP	104.336	21.975	81.391
6	Tutor Paket C Setara SMA	5.412	5.412	0
7	Fasilitator Desa Intensif	1.582	1.492	90
8	Tenaga Lapangan Dikmas	10.184	5.048	5136
9	Pendidik PAUD	359.235	48.207	311.028
10	Instruktur Kursus	55.000	33.021*	21.979
	Jumlah	569.790	146.643	423.147

Sumber: Direktorat Tenaga Teknis, 2004

*Data perkiraan

Masalah Kualifikasi dan Kompetensi PTK PNF.

Sampai tahun 2004, Pamong Belajar yang berkualifikasi akademik setara Diploma berjumlah 175 orang; S-1 sebanyak 2047 orang; S-2 sebanyak 210 orang. Pamong Belajar lainnya masih berpendidikan sekolah menengah atau lebih rendah. Dari seluruh Pamong Belajar yang tersedia pada Balai Pengembangan, sebanyak 75% menguasai program PNF, maksimal 45% menguasai pengembangan program PNF dan 30% menguasai tugas peningkatan sumber daya manusia.

Sedangkan Pamong Belajar SKB yang memiliki kualifikasi akademik setara S-1 sebanyak 621 orang. Tugas Pamong Belajar SKB adalah melaksanakan percontohan dan pengendalian mutu program PNF. Tugas ini baru dikuasai oleh 65% dari jumlah Pamong Belajar SKB. Kemampuan lain yang harus dikuasai oleh Pamong Belajar SKB adalah memberikan bimbingan, pendampingan, dan pemotivasian kepada masyarakat. Tugas ini baru dikuasai 45% dari jumlah Pamong Belajar yang ada di SKB.

Tenaga fungsional lain di lingkungan PNF adalah penilik. Penilik di seluruh Indonesia sampai dengan tahun 2004 dan yang telah *diimpasing* berjumlah 6.651 orang. Penilik yang memiliki kualifikasi akademik jenjang S-1 baru 2.345 orang. Tugas penilik sebagai pengendali program PNF baru dikuasai oleh 35% dari jumlah penilik yang ada. Tugas lain yang belum dikuasai secara baik oleh penilik adalah penguasaan program PNF dan kepenilikan PNF. Dari dua contoh tenaga PTK PNF tersebut dapat disimpulkan kualifikasi akademik dan kompetensi PTK PNF secara relatif masih rendah.

Kondisi yang Diharapkan

Dalam pembicaraan sehari-hari di masyarakat pengertian profesi berhubungan dengan pekerjaan sehari-hari, sehingga pekerjaan tukang becak, sopir, pemain sinetron disebut profesi. Apabila mendasarkan pengertian profesi pada jenis pekerjaan, maka pekerjaan PTK PNF jelas merupakan suatu profesi, namun apakah ciri-ciri profesi hanya pada jenis pekerjaan saja? Pertanyaan yang seringkali muncul bila berhadapan dengan profesi yang sudah mapan seperti halnya dokter dan pengacara yang menuntut jawaban tegas adalah "apakah pekerjaan seorang PTK PNF itu suatu profesi?".

Reed & Bergermann (1992) merumuskan sepuluh ciri yang dapat dipakai sebagai ukuran apakah suatu pekerjaan itu dapat dikatakan suatu profesi, yaitu: (1) suatu profesi harus menampilkan suatu layanan sosial yang tinggi, (2) unjuk kerja layanan sosial yang unik itu dilakukan dengan teknik-teknik intelektual, (3) anggota suatu profesi mempunyai keperdulian dan memenuhi kualifikasi yang memadai sepanjang masa kariernya, (4) suatu profesi dibentuk berdasarkan pengetahuan, teori dan keterampilan tertentu serta berdasarkan penelitian ilmiah yang khas untuk profesi tersebut, (5) layanan yang diberikan kepada masyarakat mempercayai kualifikasi anggota profesi tersebut, (6) untuk diterima sebagai suatu anggota harus melalui pendidikan yang terstandar, (7) secara tegas para anggotanya dituntut memiliki kompetensi minimal melalui prosedur seleksi, pendidikan, latihan dan lisensi ataupun sertifikasi (adanya pengakuan), (8) anggotanya menunjukkan kompetensi minimal melalui ujian dan internship di bawah pengawasan, (9) anggota profesi dilindungi dengan kode etik profesi, dan (10) secara individual atau kelompok anggota mempunyai otoritas atas praktek dan pelayanan.

Pengetahuan dan keterampilan profesional yang dimiliki perlu dibarengi dengan sikap positif terhadap profesi sehingga orang tersebut mau menggelutinya dengan segala sumber daya yang dimiliki dengan penuh kesungguhan.

Menurut Schon (1983) terdapat enam ciri suatu profesi, yaitu: (1) menuntut waktu kegiatan yang penuh, (2) adanya keterampilan khusus melalui persiapan keterampilan yang lama, (3) adanya motivasi tinggi atau semacam panggilan sehingga ada ikatan, (4) penuh tanggung jawab, (5) adanya organisasi, dan (6) ada pengakuan dari masyarakat.

Prunty & Hively (1982) mengatakan bahwa suatu pekerjaan disebut profesi apabila memiliki ciri-ciri: (1) bidang yang terorganisasi secara intelektual, terus menerus berkembang dan mendalam melalui penelitian, sehingga menghasilkan teori sistematis, praktek profesi tidak dapat dipisahkan dari dasar teoritis dan demikian sebaliknya; (2) suatu teknik intelektual yang meliputi metodologi penelitian dalam memecahkan masalah; (3) penerapan praktis tentang teknik intelektual pada urusan praktis; (4) memerlukan pendidikan dan pelatihan dalam waktu lama untuk memperoleh sertifikat, pendidikan profesional menuntut standar keahlian tertentu; (5) memerlukan adanya standar dari etika profesi yang dilakukan oleh anggota profesi; (6) adanya kemampuan kepemimpinan dalam profesi sehingga profesi tersebut semakin tinggi dan

bermutu; (7) ada asosiasi profesi yang membuat komunitas profesi berinteraksi secara bermutu, sehingga praktek profesi memenuhi standar etika profesi. Asosiasi ini mengembangkan mutu keahlian, integritas intelektual, integritas moral, dan integritas religius anggotanya; (8) pengakuan sebagai profesi, sehingga anggota menjadi sadar akan tanggung jawab profesionalnya; (9) adanya perhatian dan tanggung jawab profesional tentang praktek profesi dari anggota asosiasi; dan (10) ada hubungan yang erat dengan profesi lain.

Menurut Raka Joni (1998), suatu profesi adalah suatu pekerjaan yang memberikan layanan ahli, oleh karena itu harus dilandasi oleh pengetahuan yang luas dan mendalam tentang bidang ilmunya serta ilmu-ilmu lain yang relevan. Menggunakan keahlian itu untuk kepentingan penerima layanan (masyarakat umum), serta dapat memperhitungkan dampak jangka panjang, baik yang bersifat teknis pedagogis maupun misi mencerdaskan kehidupan bangsa. Oleh sebab itu pelaksanaan layanan profesional selalu berwujud kiat yang berlandaskan keilmuan, teknologi kependidikan dan pilihan nilai. Untuk meningkatkan kepercayaan terhadap layanan ahli di bidang kependidikan (PTK PNF), kelompok profesi harus dapat menunjukkan bahwa layanan ahli tersebut hanya dapat dilakukan oleh para profesional (PTK PNF). Oleh karena itu, diperlukan pendidikan prajabatan yang cukup panjang untuk mendapatkan landasan-landasan kependidikan, teknologi pembelajaran serta penguasaan bidang ilmu keahliannya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas mengenai syarat-syarat suatu bidang disebut profesi maka dapat dikatakan bahwa tenaga profesional adalah tenaga yang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai untuk menangani tugasnya. Pengetahuan dan keterampilan yang memadai diperoleh melalui pendidikan dan latihan khusus tentang berbagai pengetahuan dan keterampilan bidang yang bersangkutan. Pengetahuan dan keterampilan profesional yang dimiliki perlu dibarengi dengan sikap positif terhadap profesi sehingga orang tersebut mau menggelutinya dengan segala sumber daya yang dimiliki dengan penuh kesungguhan. Pengetahuan dan keterampilan yang memadai serta sikap yang positif harus dipadukan agar pelaksanaan tugas profesional dapat berjalan dengan baik.

Eksistensi suatu profesi apabila memperoleh suatu pengakuan dari masyarakat. Pengakuan akan datang apabila keunikan layanan dan jasa tidak dimiliki oleh bidang lainnya. Yang dimaksud unik adalah bahwa jasa layanan hanya dapat dilakukan oleh profesi

tersebut. Di lain pihak masyarakatpun memerlukan jasa dan layanan ahli hanya dari profesi itu. Dengan demikian apabila jasa yang diberikan memang unik, masyarakat akan memerlukannya dan profesi itu akan mantap eksistensinya. Salah satu persyaratan dari sebuah profesi yang paling menonjol adalah pemilikan kompetensi. Sejalan dengan batasan profesi di atas, maka dapat diprediksi standar kompetensi PTK PNF, yaitu: 1) menguasai bahan, 2) mengelola proses belajar mengajar, 3) mengelola pembelajaran, 4) menggunakan media dan sumber belajar, 5) menguasai landasan-landasan kependidikan dan pembelajaran, 6) Mengelola interaksi belajar mengajar, 7) menilai hasil belajar warga belajar, 8) mengenal fungsi serta program layanan bimbingan dan penyuluhan, 9) mengenal serta menyelenggarakan administrasi pendidikan, dan 10) memahami prinsip-prinsip serta menafsirkan hasil-hasil penelitian pendidikan untuk keperluan PTK PNF.

Esensi Kaji Tindak Terintegrasi Berbasis Kompetensi

Berangkat dari kelemahan model pembinaan PTK PNF di masa lalu, maka diupayakan sebuah alternatif untuk memperbaiki kinerja pelatihan dan pendidikan dalam jabatan PTK PNF. Model yang dikembangkan disebut dengan Kaji Tindak Terintegrasi Berbasis Kompetensi (KT-TBK) atau *integrated competency-based action research*. KT-TBK tidak berdiri sendiri melainkan terdiri atas berbagai komponen program yang satu dengan lainnya bersifat sistemik (*systemic*), saling bergantung (*interdependent*), dan fungsional (*functional*). Program yang satu dapat berdiri secara utuh dan mandiri, namun demikian hasil program yang satu akan terkait secara erat dengan program yang lainnya karena ia merupakan satu rangkaian 'gerbong' entitas model KT-TBK. Di samping itu, hubungan antar satu program dan lainnya bersifat timbal balik (*reciprocal*) dan saling menguntungkan bagi terbentuknya kualitas, kompetensi, dan profesionalisme PTK PNF di masa depan.

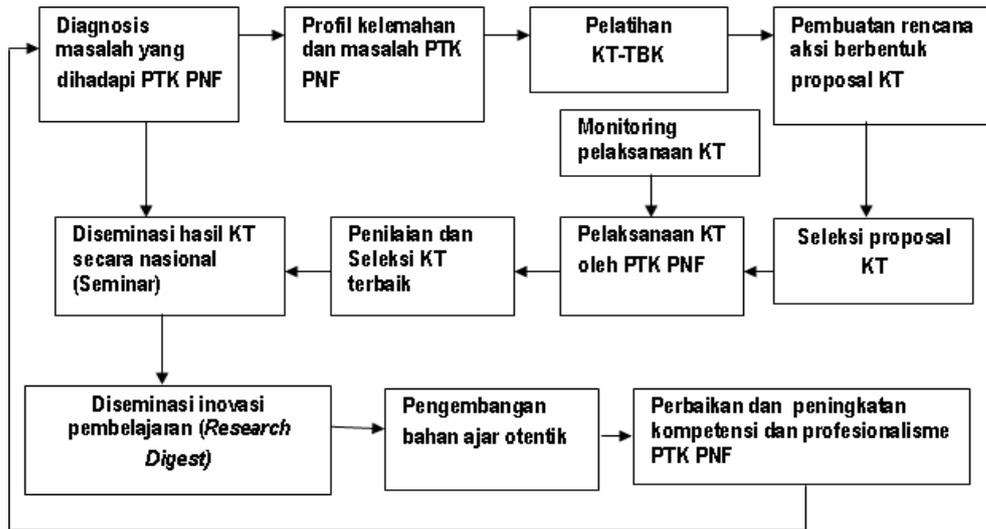
Kemampuan PTK PNF dalam meneliti di masa lalu cenderung dirancang dengan pendekatan *research-development-dissemination (RDD)*. Pendekatan ini lebih menekankan pada perencanaan penelitian yang bersifat *top-down* dan *bersifat teoretis akademik*. Paradigma demikian dirasakan tidak sesuai lagi dengan perkembangan pemikiran baru, yaitu: *research-action-improvement (RAI)*. Manajemen penelitian ala *RAI* bersifat *bottom-up* dan *realistik-otentik*, serta berangkat dari diagnosis masalah secara nyata yang diakhiri dengan sebuah perbaikan (*improvement*). Upaya perbaikan kualitas pembelajaran demikian menuntut

adanya inisiatif dan motivasi internal (*an effort to internally initiate endeavors for quality improvement*).

RAI mengisyaratkan perlunya kemitraan antar PTK PNF dengan berbagai pihak, baik pada tataran yang bersifat praktis maupun konseptual. Kebutuhan akan kemitraan yang sehat dan produktif, yang dikembangkan atas prinsip kesetaraan di antara pihak-pihak terkait sudah sangat mendesak. Penelitianpun hendaknya dikelola berdasarkan atas dasar kemitraan yang sehat (*collaborative*), sehingga kedua belah pihak dapat

memetik manfaat secara timbal balik (*reciprocity of benefits*). Melalui rancangan kaji tindak (*classroom action research*) masalah-masalah pembelajaran dapat dikaji dan dituntaskan, sehingga proses pembelajaran yang inovatif dan ketercapaian tujuan pembelajaran dapat diaktualisasikan secara sistematis.

Secara diagramatik, KT-TBK dapat digambarkan sebagai berikut.



Gambar Kaji tindak terintegrasi berbasis kompetensi

Pengertian KT-TBK

KT-TBK merupakan suatu kaji tindak (*action research*) yang terdiri atas kegiatan siklustis yang bersifat menyeluruh, yaitu: analisis, penemuan fakta, konseptualisasi, perencanaan, pelaksanaan, dan penemuan fakta tambahan, dan evaluasi (Gidesonse, 1983; Hopkins, 1992; 1993). KT-TBK pada esensinya merupakan sebuah inkuiri yang bersifat reflektif mandiri yang dilakukan oleh partisipan dalam situasi sosial termasuk kependidikan dengan maksud untuk meningkatkan kemantapan rasionalitas dari (a) praktek-praktek sosial maupun kependidikan, (b) pemahaman terhadap praktek-praktek tersebut, dan (c) situasi pelaksanaan praktek-praktek pembelajaran (Kemmis, 1982; McTaggart, 1991; 1993). Secara ringkas, KT-TBK dapat dikatakan sebagai suatu upaya untuk mengkaji dan investigasi yang bersifat reflektif, partisipatif, kolaboratif dan spiral, yang memiliki tujuan untuk melakukan perbaikan-perbaikan terhadap sistem, cara kerja, proses, isi, kompetensi, atau situasi.

Karakteristik KT-TBK

Menurut House & Lapan (1978), beberapa aspek penting dari KT-TBK yang perlu mendapat perhatian adalah hal-hal berikut, yaitu:

1. KT-TBK adalah suatu pendekatan untuk meningkatkan pendidikan dengan melakukan perubahan terhadapnya dan pembelajaran sebagai konsekuensi terjadinya perubahan
2. KT-TBK bersifat partisipatori, yaitu melibatkan orang yang melakukan kegiatan untuk meningkatkan prakteknya sendiri
3. KT-TBK dikembangkan melalui suatu *self-reflective spiral; a spiral of cycles of planning, acting, observing, reflecting, and re-planning*.
4. KT-TBK adalah kolaboratif. Melibatkan partisipan berasama-sama bergabung untuk mengkaji praktek dan mengembangkan pemahaman tentang makna tindakan.
5. KT-TBK menumbuhkan kesadaran diri mereka yang berpartisipasi dan berkolaborasi dalam seluruh tahapan KTK.
6. KT-TBK adalah proses belajar yang sistematis. Dalam proses tersebut menggunakan kecerdasan kritis untuk membangun komitmen melakukan tindakan.
7. KT-TBK memerlukan orang untuk membangun teori tentang praktek mereka (PTK PNF)

8. KT-TBK memerlukan gagasan dan asumsi ke dalam praktek untuk mengkaji secara sistematis bukti yang menantanginya (memvalidasi hipotesis tindakan).
9. KT-TBK memungkinkan kita untuk memberikan justifikasi secara rasional tentang pekerjaan kita terhadap orang lain dan membuat orang menjadi kritis dalam analisis.

Atas dasar asumsi tersebut di atas maka dapat diidentifikasi beberapa ciri penting dari KT-TBK sebagai berikut.

1. Inkuiri reflektif. KT-TBK berangkat dari permasalahan pembelajaran riil yang sehari-hari dihadapi oleh PTK PNF dan warga belajar. Jadi, kegiatan mengkaji dan investigasi didasarkan pada pelaksanaan tugas (*practice driven*) dan pengambilan tindakan untuk memecahkan masalah yang dihadapi (*action driven*). Masalah yang menjadi fokus adalah permasalahan yang spesifik dan kontekstual, sehingga tidak terlalu merisaukan tentang kerepresentatifan sampel dalam rangka generalisasi. Tujuan kaji tindak bukanlah untuk menemukan pengetahuan baru yang dapat diberlakukan secara meluas. Tujuan kaji tindak adalah untuk memperbaiki praksis secara langsung, di sini dan sekarang. Kaji tindak menggunakan metodologi yang agak longgar, khususnya dalam kalibrasi instrumen penelitian. Namun demikian, kaji tindak kelas tetap menerapkan metodologi yang taat azas (*disciplined inquiry*) dalam hal pengumpulan data yang menekankan pada obyektivitas (Raka Joni, 1998; Sanford, 1970). Pengungkapan kebenaran dilakukan secara cermat dan obyektif sehingga memungkinkan terselenggaranya peninjauan ulang oleh sejawat (*peer review*). Proses dan temuan kaji tindak didokumentasikan secara rinci dan cermat. Proses dan temuan dilakukan melalui observasi, evaluasi, dan refleksi sistematis dan mendalam. Kaji tindak dapat disimpulkan sebagai suatu inkuiri reflektif (*self-reflective inquiry*).
2. Kolaboratif. Upaya perbaikan proses dan hasil pembelajaran tidak dapat dilakukan sendiri oleh dosen, tetapi ia harus berkolaborasi dengan PTK PNF. Kaji tindak merupakan upaya bersama dari berbagai pihak untuk mewujudkan perbaikan yang diinginkan. Kolaborasi ini tidak bersifat 'basa basi', tetapi harus ditampilkan dalam keseluruhan proses perencanaan, pelaksanaan kaji tindak tersebut (perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi-evaluasi, dan refleksi), sampai dengan penyusunan laporan hasil penelitian.
3. Reflektif. Kaji tindak memiliki ciri khusus, yaitu sikap reflektif yang berkelanjutan. Berbeda dengan

pendekatan penelitian formal, yang sering mengutamakan pendekatan eksperimental, kaji tindak lebih menekankan pada proses refleksi terhadap proses dan hasil penelitian secara terus menerus untuk mendapatkan penjelasan dan justifikasi tentang kemajuan, peningkatan, kemunduran, kurang-efektifan, dan sebagainya dari pelaksanaan sebuah tindakan untuk dapat dimanfaatkan memperbaiki proses tindakan pada siklus kegiatan lainnya.

Prinsip Dasar KT-TBK

Kemmis (1982) dan McTaggart (1991; 1993) menyebutkan ada enam 6 prinsip dasar yang melandasi kaji tindak sebagai berikut.

1. Prinsip pertama bahwa tugas PTK PNF yang utama adalah menyelenggarakan pembelajaran yang baik dan berkualitas. Untuk itu, PTK PNF memiliki komitmen dalam mengupayakan perbaikan dan peningkatan kualitas pembelajaran secara terus menerus. Dalam menerapkan suatu tindakan untuk memperbaiki kualitas pembelajaran ada kemungkinan tindakan yang dipilih tidak/kurang berhasil maka ia harus tetap berusaha mencari alternatif lain. PTK PNF harus menggunakan pertimbangan dan tanggung jawab profesionalnya dalam mengupayakan jalan keluar dari permasalahan yang dihadapi dalam pembelajaran. Prinsip pertama ini berimplikasi pada sifat penelitian tindakan sebagai suatu upaya yang berkelanjutan secara siklistis sampai terjadinya peningkatan, perbaikan, atau 'kesembuhan' sistem, proses, hasil, dan sebagainya.
2. Prinsip ke dua bahwa meneliti merupakan bagian integral dari pembelajaran, yang tidak menuntut kekhususan waktu maupun metode pengumpulan data. Tahapan-tahapan kaji tindak selaras dengan pelaksanaan pembelajaran, yaitu: persiapan (*planning*), pelaksanaan pembelajaran (*action*), observasi kegiatan pembelajaran (*observation*), evaluasi proses dan hasil pembelajaran (*evaluation*), dan refleksi dari proses dan hasil pembelajaran (*reflection*). Prinsip ke dua ini menginsyaratkan agar proses dan hasil pembelajaran direkam dan dilaporkan secara sistematis dan terkendali menurut kaidah ilmiah.
3. Prinsip ke tiga bahwa kegiatan meneliti, yang merupakan bagian integral dari pembelajaran, harus diselenggarakan dengan tetap bersandar pada alur dan kaidah ilmiah. Alur pikir yang digunakan dimulai dari pendiagnosis masalah dan faktor penyebab timbulnya masalah, pemilihan tindakan yang sesuai

dengan permasalahan dan penyebabnya, merumuskan hipotesis tindakan yang tepat, penetapan skenario tindakan, penetapan prosedur pengumpulan data dan analisis data. Objektivitas, reliabilitas, dan validitas proses, data, dan hasil tetap dipertahankan selama penelitian berlangsung. Prinsip ke tiga ini mempersyaratkan bahwa dalam menyelenggarakan kaji tindak agar tetap menggunakan kaidah-kaidah ilmiah.

4. Prinsip ke empat bahwa masalah yang ditangani adalah masalah-masalah pembelajaran yang riil dan merisaukan tanggung jawab profesional dan komitmen terhadap pemerolehan mutu pembelajaran. Prinsip ini menekankan bahwa diagnosis masalah bersandar pada kejadian nyata yang berlangsung dalam konteks pembelajaran yang sesungguhnya. Bila pendiagnosian masalah berdasar pada kajian akademik atau kajian literatur semata, maka penelitian tersebut dipandang sudah melanggar prinsip ke-otentikan masalah. Jadi masalah harus didiagnosis dari kancah pembelajaran yang sesungguhnya, bukan sesuatu yang dibayangkan akan terjadi secara akademik.
5. Prinsip ke lima bahwa konsistensi sikap dan kepedulian dalam memperbaiki dan meningkatkan kualitas pembelajaran sangat diperlukan. Hal ini penting karena upaya peningkatan kualitas pembelajaran tidak dapat dilakukan sambil lalu, tetapi menuntut perencanaan dan pelaksanaan yang sungguh-sungguh. Oleh karena itu, motivasi untuk memperbaiki kualitas harus tumbuh dari dalam (motivasi intrinsik), bukan sesuatu yang bersifat instrumental.
6. Prinsip ke enam adalah cakupan permasalahan penelitian tindakan tidak seharusnya dibatasi pada masalah pembelajaran di ruang kelas, tetapi dapat diperluas pada tataran di luar ruang kelas, misalnya: tataran sistem atau lembaga. Perspektif yang lebih luas akan memberi sumbangan lebih signifikan terhadap upaya peningkatan kualitas pendidikan.

Tujuan KT-TBK

Hopkins (1991; 1993) menyebutkan bahwa secara umum, KT-TBK diarahkan pada pencapaian sasaran sebagai berikut.

1. Memperbaiki dan meningkatkan kualitas isi, masukan, proses dan hasil pembelajaran;
2. Menumbuh-kembangkan budaya meneliti para PTK PNF agar lebih proaktif mencari solusi terhadap

permasalahan pembelajaran;

3. Menumbuhkan dan meningkatkan produktivitas meneliti para PTK PNF, khususnya dalam mencari solusi masalah-masalah pembelajaran;
4. Meningkatkan kolaborasi antar PTK PNF dalam memecahkan masalah pembelajaran.

Luaran

Luaran umum yang diharapkan dihasilkan dari KT-TBK adalah sebuah peningkatan atau perbaikan (*improvement and therapy*), antara lain sebagai berikut.

1. Peningkatan atau perbaikan terhadap kinerja belajar warga belajar .
2. Peningkatan atau perbaikan terhadap mutu proses pembelajaran.
3. Peningkatan atau perbaikan terhadap kualitas penggunaan media, alat bantu belajar, dan sumber belajar lainnya.
4. Peningkatan atau perbaikan terhadap kualitas prosedur dan alat evaluasi yang digunakan untuk mengukur proses dan hasil belajar warga belajar.
5. Peningkatan atau perbaikan terhadap masalah-masalah pendidikan warga belajar.
6. Peningkatan dan perbaikan terhadap kualitas penerapan kurikulum dan pengembangan kompetensi warga belajar .

Program dan Kegiatan KT-TBK

KT-TBK terdiri atas beberapa program dan kegiatan yang terjalin dalam suatu rangkaian gerbong menuju suatu perbaikan mutu PTK PNF secara mendasar, menyeluruh, dan terintegrasi berbasis kompetensi. Adapun program-program yang ditawarkan terdiri atas: (1) identifikasi masalah pembelajaran yang dihadapi oleh PTK PNF (*diagnosis*), (2) pemetaan masalah yang dihadapi PTK PNF (*mapping or profiling*), (3) pelatihan KT (*training*), (4) pembuatan proposal KT (*proposal writing*), pemilihan proposal KT (*proposal selection*), (5) pelaksanaan KT (*action research implementation*), (6) pemantauan penyelenggaraan KT (*field monitoring*), (7) pemilihan hasil KT (*report selection*), (8) diseminasi hasil KT melalui seminar nasional/propinsi/kabupaten (*national/ provincial/ district seminar on research findings*), (9) pemilihan laporan KT terbaik untuk dideseminasikan lewat jurnal hasil kajian (*reseach digest*), dan (10) pengembangan bahan ajar yang otentik (*modular or instructional materials*)

KESIMPULAN

Peningkatan kompetensi PTK PNF secara umum dapat dilakukan lewat pelaksanaan kaji tindak yang integral dengan peningkatan kompetensi PTK PNF melalui berbagai bentuk kegiatan yang satu sama lainnya saling berkait dan berkelanjutan. Karakteristik, prinsip dasar, tujuan, dan program yang terangkum secara sinergis dalam model pengembangan mutu PTK PNF melalui KT-TBK akan menjamin ketercapaian dan peningkatan kompetensi PTK PNF di masa datang.

PT-TBK merupakan suatu program yang dirancang dari, oleh, dan untuk PTK PNF. Kesadaran PTK PNF terhadap masalah riil yang dihadapi dan pemahaman terhadap masalah tersebut akan sangat membantu menumbuhkembangkan motivasi internal dalam menyelesaikan permasalahan warga belajar dalam pembelajaran nonformal. PT-TBK merupakan suatu kegiatan yang berkelanjutan dengan tujuan utama adalah perbaikan mutu pendidikan nonformal secara reflektif, kolaboratif, dan inkuiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Gideonse, H.D. (1983). *In search of more effective service: Inquiry as a guiding image for educational reform in America*. Cincinnati, OHIO: University of Cincinnati.
- Hopkins, L.T. (1992). *The emerging self and school*. New York: Harper.
- Hopkins, D. (1993). *A teacher's guide to classroom research*. 2nd ed. Philadelphia: Open University Press.
- House, E.R. & Lapan, S. (1978). *Survival in the classroom*. Boston: Allyn & Bacon.
- Kemmis, S. (1982). *Action research in retrospect and prospect*. Inc.
- Henry, C. C., & Kemmis, R. Mc. *The Action Research Reader Action Research and the Critical Analysis of Pedagogy*. Gelong: Deakin University, Vic., hal. 11-29.
- McTaggart, M. (1993). Action research and parent participation: Contradictions, concerns and consequences. *Curriculum Perspectives*, Vol.4, No.2, hal. 7-14.
- McTaggart, R. (1991). *Action research*. Melbourne: Deakin University Press.
- Prunty, J. J. & Hively, W. (1982). *The principal's role in school effectiveness: An analysis of administrative practices of four Elementary School leaders*. St. Louis: CEMREL.
- Raka Joni, T. (1998). *Penelitian tindakan kelas: beberapa permasalahannya*. Jakarta: PCP PGSM Ditjen Dikti.
- Joni, R. (1991). Relevansi pendekatan suplay and demand dalam pengadaan tenaga profesional kependidikan. *Makalah Dies natalis IKIP Malang*, 14 Oktober 1992.
- Reed, A. J. S. & Bergemann, V. E. (1992). *A guide to observation and participation: In the classroom*. Connecticut: The Dushkin Publishing Group, Inc.
- Dit. PTK PNF 2006. *Rencana strategis: Penghargaan, kesejahteraan dan perlindungan bagi pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan Nonformal*. Jakarta: Dit. PTK PNF.
- Sanford, N. (1970). Whatever happened to action research. *Journal of Social Issues*, Vol. 26, No.4, halaman 3-23.
- Schon, D. A. (1983). *The reflective practitioner: How professional think in action*. New York: Basic Book.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintahan dan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.